

### **BAB III**

## **VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI**

### **TAHUN 2005 – 2025**

#### **3.1. Visi Pembangunan**

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi Provinsi Jambi pada masa lalu dan saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki dan amanat pembangunan daerah yang tercantum dalam UU N0. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 serta Pembukaan UUD 1945, maka Visi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 adalah :

#### ***JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA***

Visi Pembangunan Provinsi Jambi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Visi Pembangunan Provinsi Jambi tersebut harus dapat diukur dapat mengetahui tingkat **kemajuan, kemandirian, keadilan** dan **kesejahteraan** yang ingin dicapai.

Tingkat kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah dapat dinilai berdasarkan berbagai indikator. Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu daerah diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan distribusinya. Tingginya tingkat pendapatan rata-rata yang diiringi dengan distribusi yang merata pada suatu daerah, maka dapat dikatakan daerah tersebut makmur, dan dengan demikian dikategorikan sebagai daerah yang maju dan sejahtera.

Daerah yang maju juga pada umumnya adalah daerah yang tingkat kontribusi sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan Produk Domestik Regional Bruto maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu dalam proses produksi berkembang keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor jasa-jasa; serta pemanfaatan sumber alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata ekonominya telah tersusun dan tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. Daerah yang maju umumnya adalah daerah yang perekonomiannya stabil. Gejolak yang bersifat lokal dan regional maupun nasional dapat direndam oleh ketahanan ekonominya.

Tingkat kemajuan dan kesejahteraan daerah juga diukur berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dikatakan makin maju apabila makin tinggi tingkat pendidikan penduduknya, tingkat partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan, laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas SDM yang makin baik tercermin dari produktivitas yang makin tinggi.

Selain indikator sosial ekonomi, daerah yang maju juga ditandai dengan sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap. Lembaga politik dan kemasyarakatan telah berfungsi berdasarkan aturan. Daerah yang maju juga ditandai oleh peranserta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, hukum, sosial, politik, maupun keamanan dan ketertiban. Dalam aspek politik, daerah yang maju pada umumnya adalah yang telah memiliki budaya demokrasi, warganya terjamin hak-haknya yang terjamin rasa keamanan dan ketentraman dalam hidupnya.

Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik masyarakat daerah, regional dan nasional maupun dalam hubungannya dengan masyarakat internasional. Terlebih lagi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas ketergantungan antar daerah, antar bangsa semakin kuat. Kemandirian dengan demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenai bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.

Daerah yang mandiri adalah yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian. Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain dari SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; pembiayaan pembangunan bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), yang berarti sumber pembiayaan pembangunan daerah tidak semata-mata tergantung dari pembiayaan yang bersumber dari APBN, dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok daerahnya. Apabila karena SDA tidak lagi

memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan lain, sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan; dan daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi nasional maupun ekonomi global.

Kemajuan dan kemandirian suatu daerah tidak hanya dicerminkan dari perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas. Kemajuan dan kemandirian juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau suatu daerah atau bangsa mengenai dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Karena menyangkut sikap, maka kemandirian pada dasarnya adalah masalah budayanya dalam arti seluas-luasnya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Pembangunan Provinsi Jambi bukan hanya untuk mencapai kemajuan dan kemandirian, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus objek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun dalam menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, masalah keadilan merupakan ciri menonjol pula dalam meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, serta perlindungan dan persamaan di depan hukum, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik antar individu, gender, dan wilayah.

### **3.2. Misi Pembangunan**

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. **Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif** dengan memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan komperatif masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan serta memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek; pembangunan infrastruktur yang maju serta mampu mendukung kegiatan perekonomian dan pengembangan wilayah secara terpadu, reformasi di bidang hukum dan aparatur.

2. **Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya** dengan jalan memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal, dan memantapkan landasan spiritual, moral, dan etik pembangunan daerah.
3. **Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum** melalui peningkatan kelembagaan dan budaya demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan substansi hukum, struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskrimatif, dan memihak pada rakyat kecil.
4. **Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib** dengan memberi dukungan dalam memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja serta dengan menggalang partisipasi masyarakat melalui sistem keamanan swakarsa.
5. **Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan** dengan mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang tertinggal, menanggulangi kemiskinan secara bertahap, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sara dan prasarana ekonomi, dan menghapuskan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk diskriminasi gender.
6. **Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan** dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial dan ekonomi, dan upaya konservasi; pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan; pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

